

INOVASI PEMULIHAN DAYA DUKUNG DAS DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN BARU DAN PERUBAHAN IKLIM



- Disampaikan pada acara Pertemuan FORDAS-LH NTB
Tanggal 11 November 2021 di Mataram

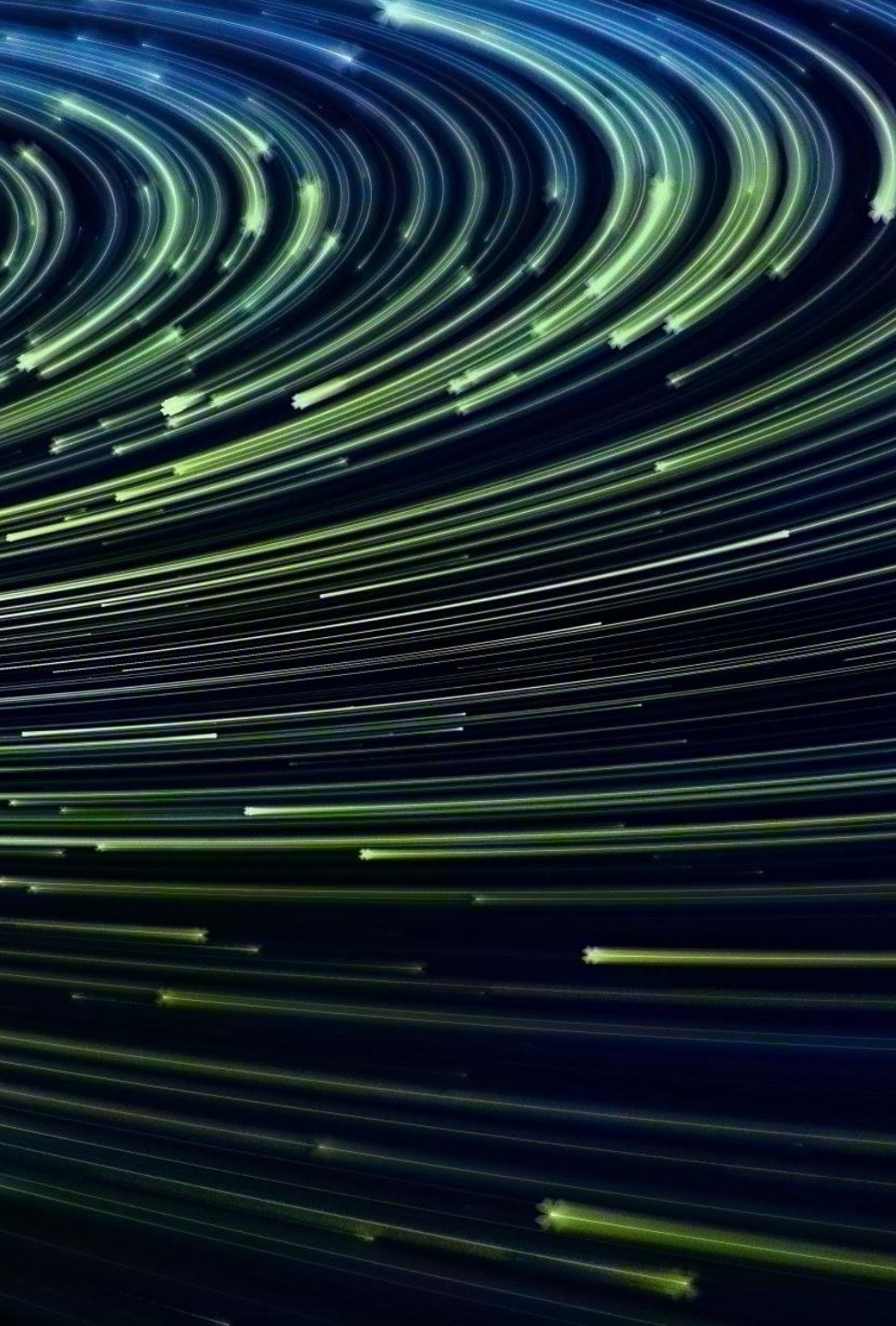


- Oleh Markum
Ketua Forum DAS-LH NTB

KISI-KISI PEMBAHASAN

- A. Proses dialektika Pengelolaan Hutan di Indonesia
- B. Mainstream perubahan Kebijakan: Transisi atau Transformasi ?
- C. Tantangan Inovasi Pengelolaan DAS
- D. Belajar dari Pengalaman Inovasi Daerah
- E. Penutup





A. DIALEKTIKA PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

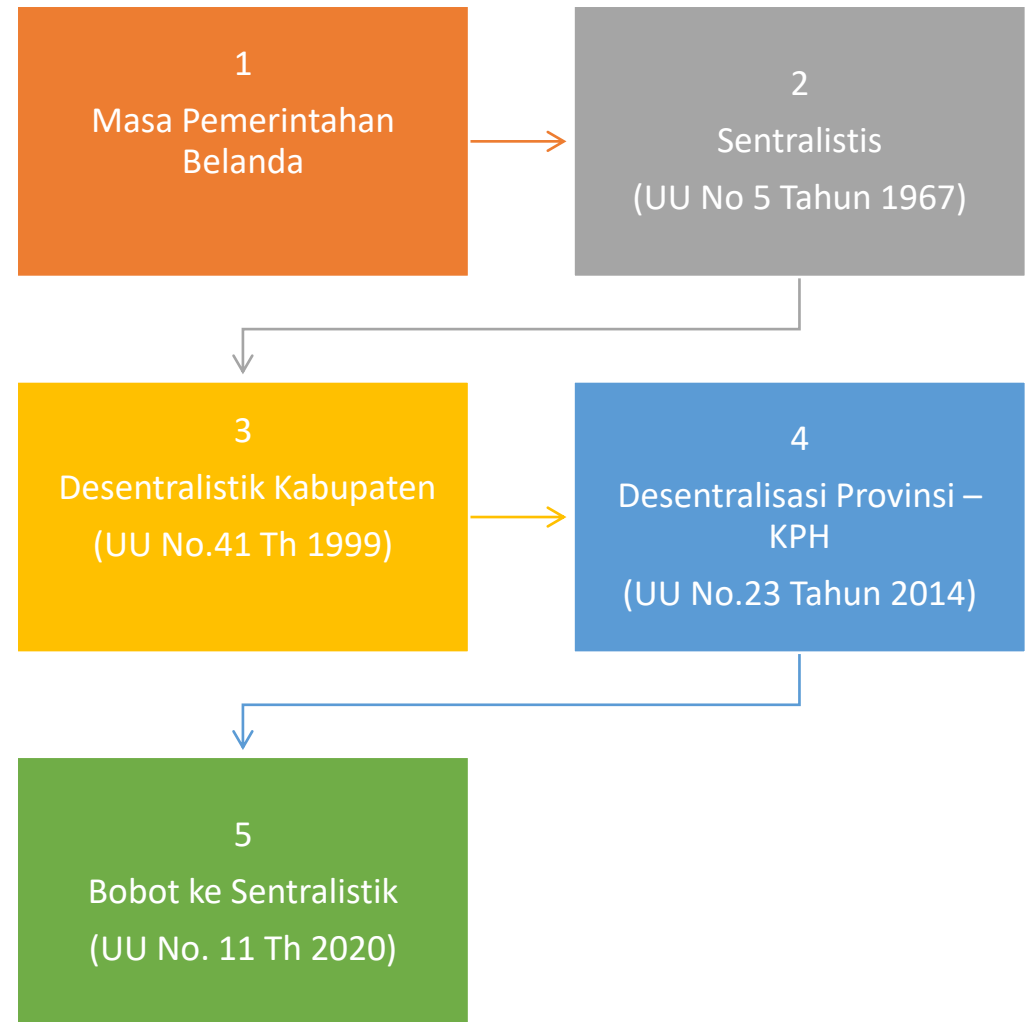
Teori dialektika Hegel: Sebuah proses yang terus menerus mengalami perubahan dari sebuah kondisi yang ada (thesis) – penolakan atau gugatan atas kondisi yang ada tersebut (antithesis) – proses penelaahan kritis (sintesis) dan menuju pada kondisi empiris yang baru (tesis baru).



Proses perubahan sebagaimana teori Hegel sebenarnya secara normatif terjadi pada semua aspek, tetapi yang menarik untuk sektor kehutanan adalah prosesnya relatif cepat dan sangat dinamis.

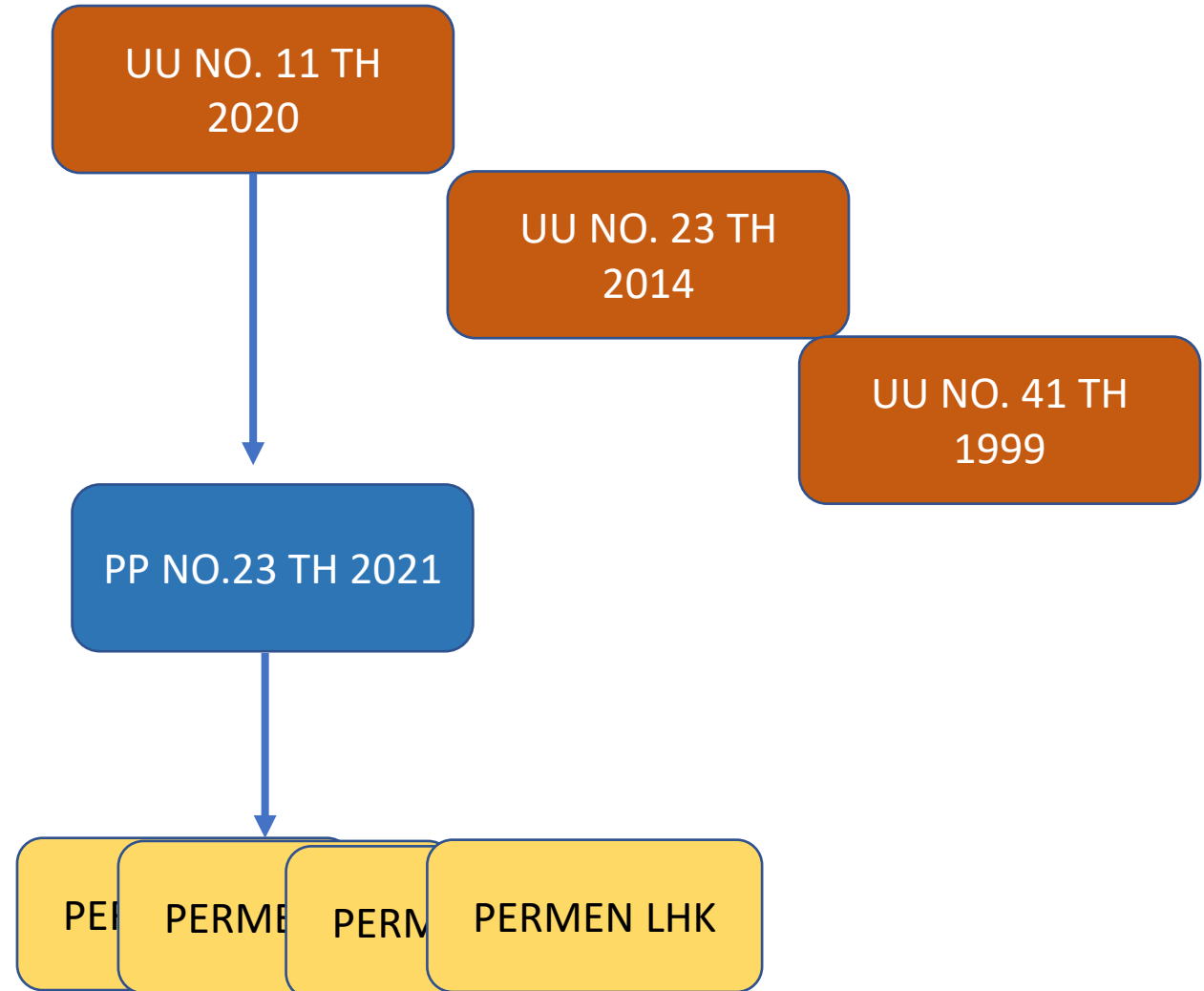
SIKLUS DISTRIBUSI KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN

- Sistem kewenangan pengelolaan hutan di Indonesia, mengikuti masanya yang dilegitimasi dengan kehadiran Undang-Undang tersendiri
- Dari sentralistik – desentralistik kabupaten – desentralistik provinsi – sentralistik (gambaran proses dialektika)



POSISI LEGALITAS PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

- UU Cipta kerja merubah beberapa pasal yang ada di dalam UU Kehutanan : 3 pasal di hapus dan 4 pasal dirubah
- Turunan perubahan dalam UU Cipta Kerja diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Dengan demikian tafsir muncul : PP tentang penyelenggaraan Kehutanan posisinya secara empiris menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan UU 41 Kehutanan.



B. MAINSTREAM KEBIJAKAN BARU



Memberikan ruang lebih longgar terhadap ijin pemanfaatan Kawasan hutan, dengan persyaratan lebih mudah dan bisa langsung akses ke pusat, baik di hutan produksi maupun di hutan lindung



Pemanfaatan Kawasan hutan berorientasi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan memberikan andil lebih besar kepada peran badan usaha (swasta) dan komunitas. Pengelolaan hutan cenderung di pihak ketigakan.



Peran kelembagaan di tingkat tapak (KPH) bergeser sebagai fungsi perencanaan dan fasilitasi, kecil perannya sebagai implementor,

IMPLIKASI NEGATIF TERHADAP SDH

Potensi
pengurangan
tutupan hutan
lebih intens

Kasus-kasus
konflik tenurial
semakin
mengemuka

Militansi
pengawasan
KPH terhadap
praktik
pengelolaan
hutan melemah

Kasus-kasus
penegakan
hukum lebih
longgar



C. TANTANGAN INOVASI PENGELOLAAN DAS

Orientasi rehabilitasi lahan, lahan kritis menjadi lahan produktif dengan pilihan jenis tanaman MPTS , dan jumlah tanaman 200 – 400 per ha.

Pengembangan model-model percontohan budidaya tanaman dengan sistem agroforestry di lahan kritis dan lahan miring (Skala Mikro DAS);

Pengembangan kelembagaan terintegrasi, melalui skema Kerjasama antar wilayah (hulu – tengah – hilir)

C. TANTANGAN INOVASI PENGELOLAAN DAS

1. Mekanisme pemberian penghargaan atas keberhasilan pengelolaan hutan oleh badan usaha ataupun oleh masyarakat
2. Pengembangan model kemitraan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam skema Kerjasama mewujudkan pola ketahanan pangan di Kawasan hutan



D. BELAJAR PENGALAMAN DARI DAERAH

1. Mekanisme imbal jasa lingkungan melalui program PES
2. Pemberian insentif Community Carbon Fund
3. Pengembangan jaringan kelompok Hulu – Hilir – Pesisir
4. Pengembangan model desa ramah lingkungan (desa wisata, desa energi, desa iklim, ..)

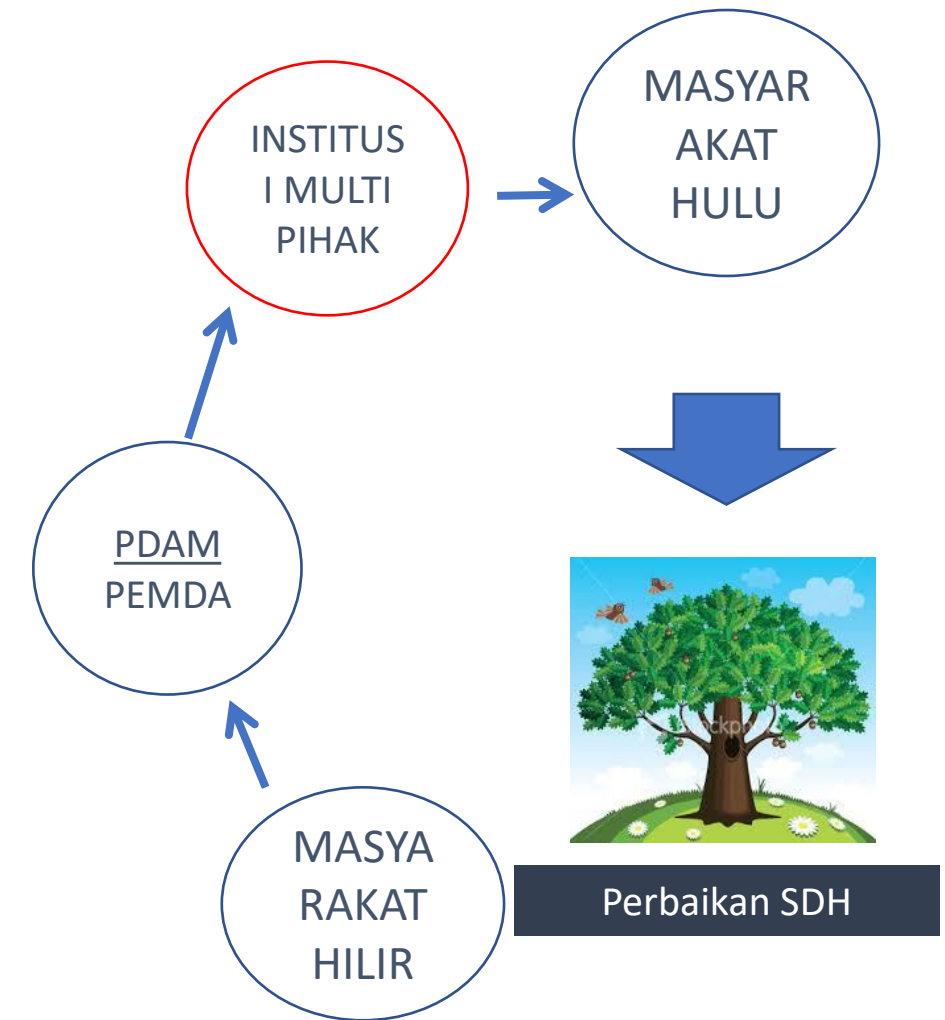


IMBAL JASA LINGKUNGAN

1

Pengembangan model kerja kolaboratif melalui program PES (*Payment Environment Service*) atau Jasa Lingkungan

PIHAK/LEMBAGA	UNSUR	PERAN
1. WWF –NUSRA	NGO	Inisiator dan dukungan pendanaan
2. UNRAM	Universitas	Riset Valuasi Ekonomi, dan Willingness to Pay
3. Masyarakat Hulu	Masyarakat	Mengusulkan dan menerima dana hibah
4. Masyarakat Hilir	Masyarakat	Membayar iuran jasa lingkungan
5. DPR	Legeslatif	Penyusunan dan pengesahan Perda
6. Dinas Kehutanan	Pemerintah	Penyusunan draft Perda
7. PDAM	BLUD	Memungut iuran Jasling melalui rekening air
8. IMP	Independen	Mengelola dana Jasling (sampai tahun 2015 telah didistribusik dana sebesar 2 milyar lebih)



Mekanisme Pungutan dan pengelolaan dana Jasling

COMMUNITY CARBON FUND

2

Pengembangan *Community Carbon Fund* , melibatkan, 163 KK, 100 ha. Kerjasama FFI-Unram-Masyarakat

Introdusir Spesies Tanaman

plot	Spesies dominan	Kerapatan pohon (trees/ha)	Total cadangn karbon (ton C/ha)
ABI.I	<i>Erythrina sp</i>	120	89.46
ABI.II	<i>Swietenia mahagoni</i>	132	214.45
AB.II	<i>Coffea robusta</i>	120	84.71

Community Carbon Fund

Penyusunan baseline data cadangan karbon

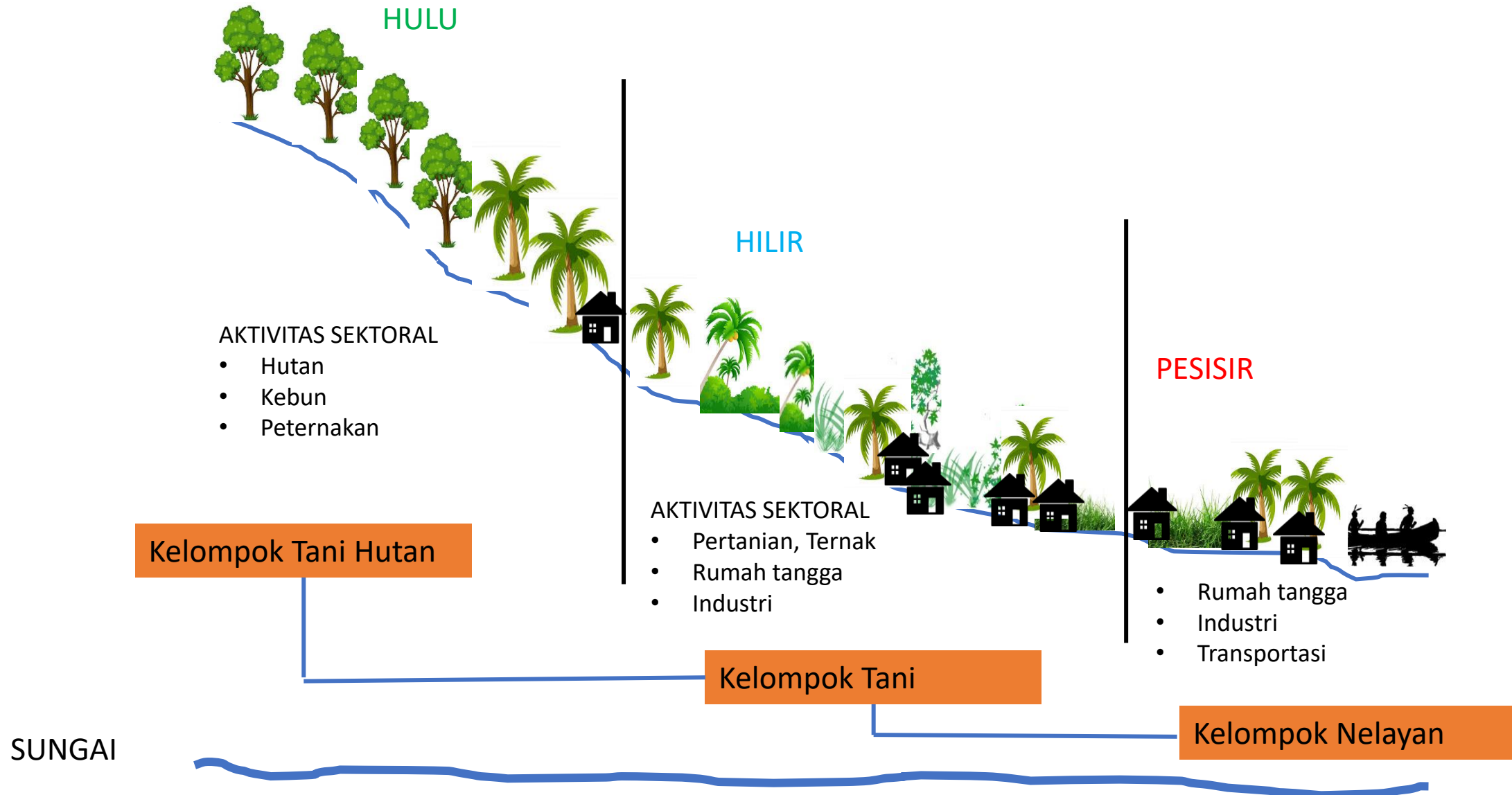
Penyediaan bibit tanaman kayu dan MPTs

Evaluasi setiap tahun (selama 3 tahun), menentukan insentif untuk tindakan petani memelihara tanaman

Dana insentif diberikan kepada pengelola (70 %), Kelompok Tani (15 %), dan desa (15%).



JARINGAN KELOMPOK HULU-HILIR-PESISIR



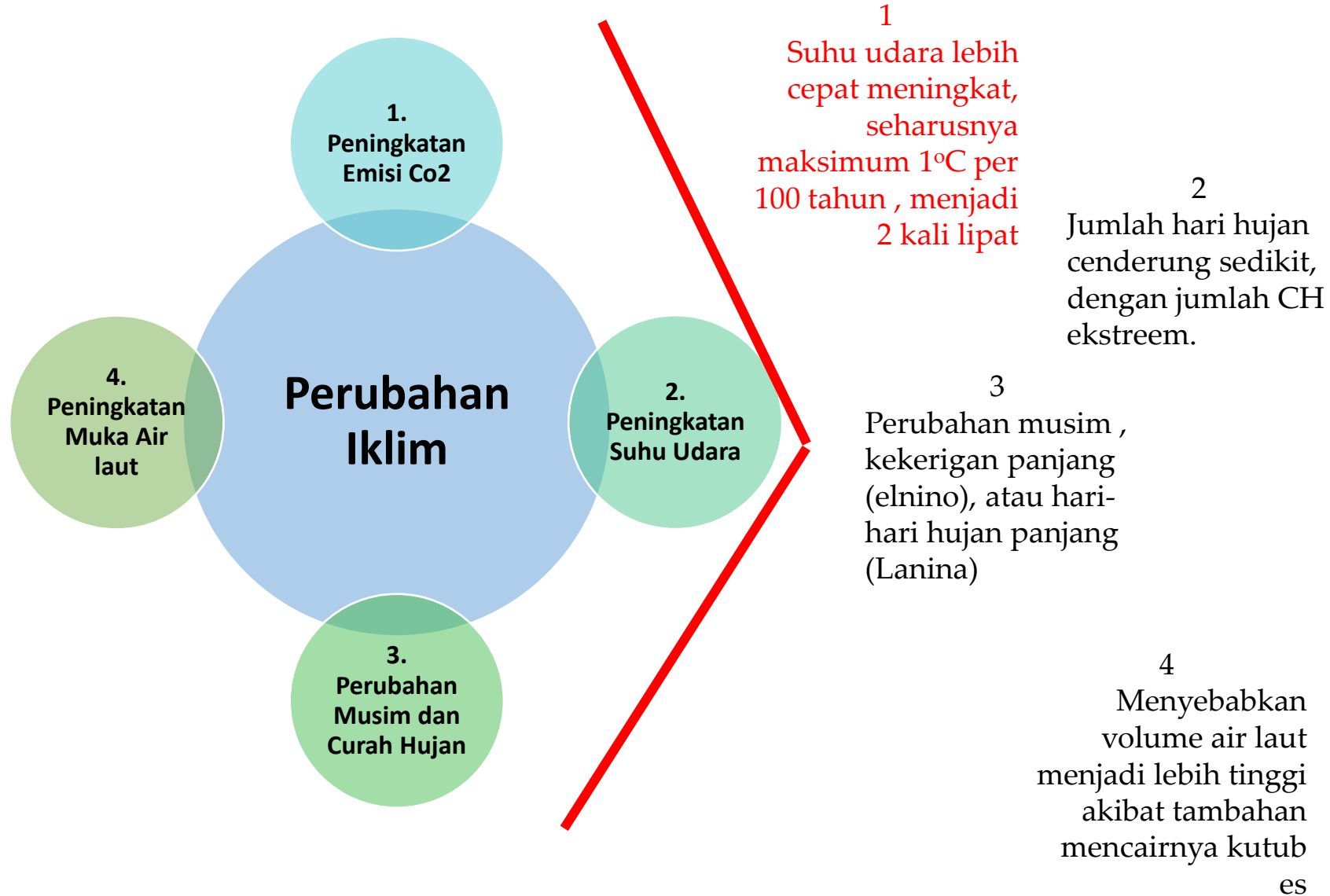
TANTANGAN DAS DAB PERUBAHAN IKLIM

PERUBAHAN IKLIM

Berubahnya iklim karena adanya perubahan ekstrem atmosfer, disebabkan oleh peningkatan emisi (CO_2), akibat aktivitas manusia

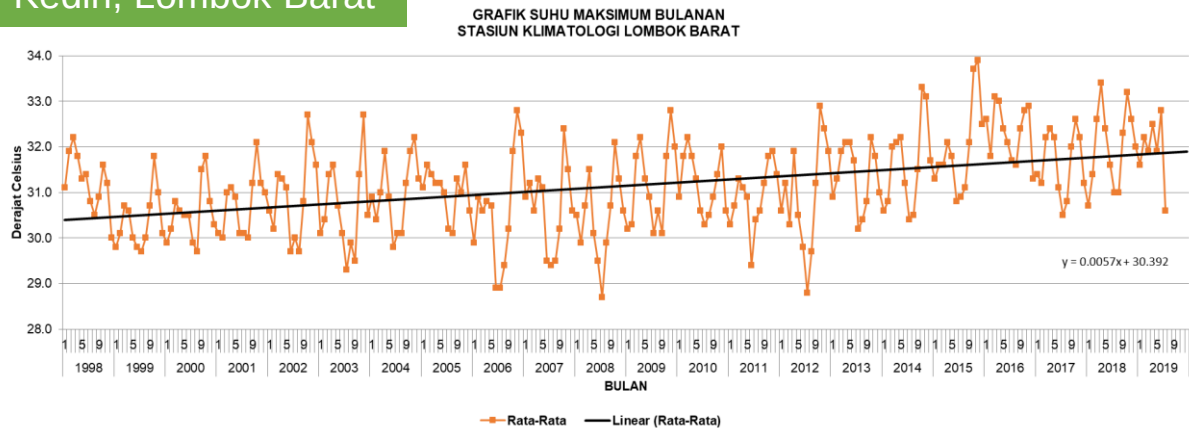


PERUBAHAN IKLIM, Indikator !



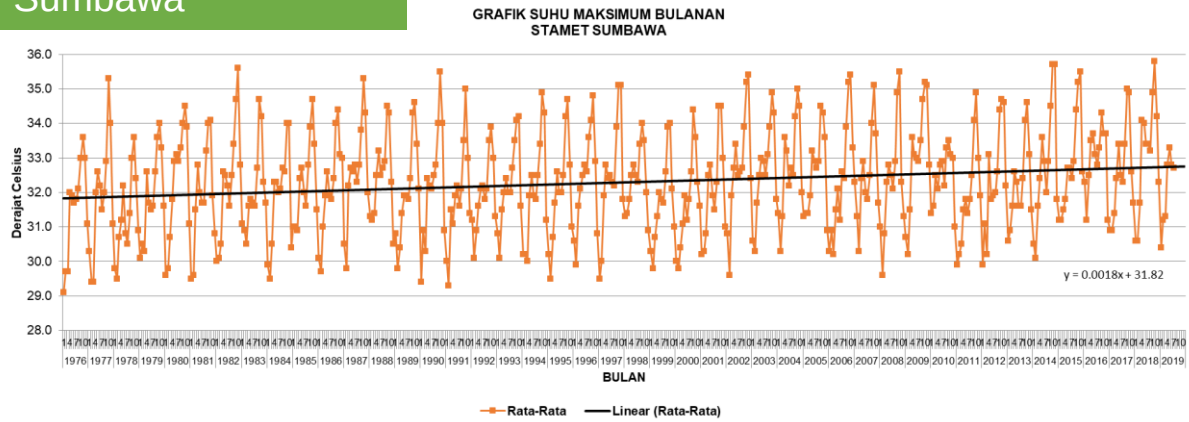
Trend Suhu Udara Maksimum NTB

Kediri, Lombok Barat



Ada trend
kenaikan suhu
udara maksimum
baik di Pulau
Lombok maupun
di Sumbawa

Sumbawa



OBYEK TERDAMPAK

- Kerentanan Pertanian
- Kerentanan Pesisir & Kelautan
- Kualitas Kesehatan
- Daya tarik Pariwisata

Sektoral

- Ancaman Produksi Pertanian
- Produksi perikanan laut
- Pendapatan pariwisata

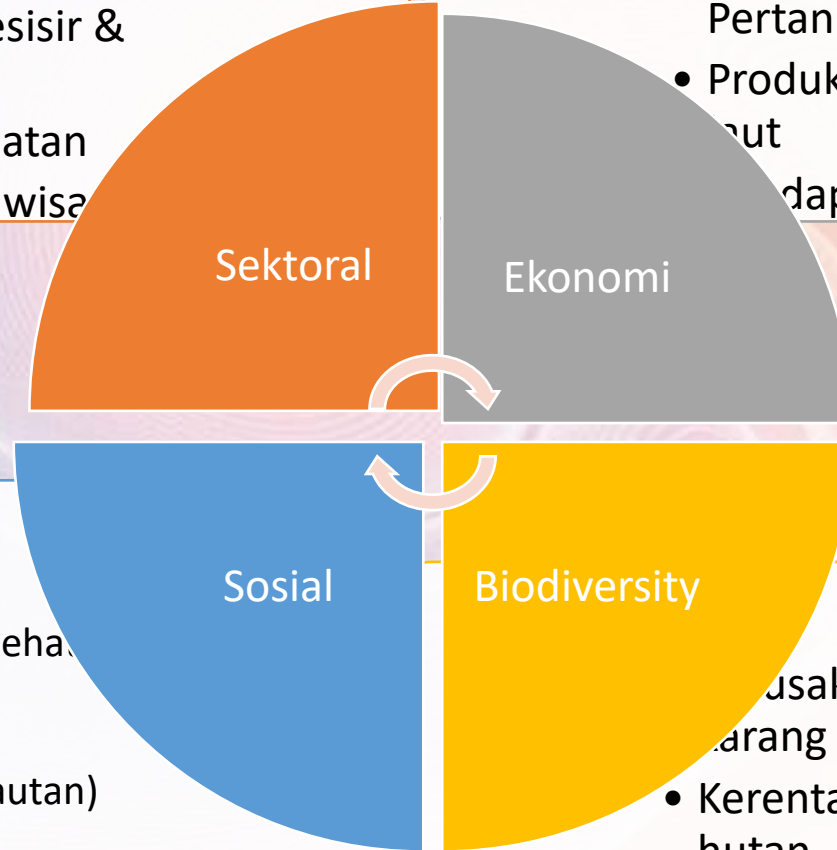
Ekonomi

- Kerentanan kesehatan masyarakat
- Pengangguran (pertanian, kelautan)
- Kemiskinan
- Rasa tidak aman (Rob, Banjir)

Sosial

Biodiversity

- Ancaman kerusakan terumbu karang
- Kerentanan kebakaran hutan



KERENTANAN BENCANA PERUBAHAN IKLIM

Peningkatan suhu atmosfer

Pesisir dan Laut

Perubahan pola dan curah hujan

ROB

Gelombang Ekstrem

Abrasi Pantai

Kerusakan Terumbu karang dan Mangrove

Gagal Tanam/Panen

Banjir

Kekeringan



KEJADIAN PENTING DI NTB

Senin 24 Februari 2020, 12:09 WIB

Banjir Bandang di Lombok Timur, BPBD NTB Lakukan Upaya Darurat

Ihfa Firdausya | Nusantara



Dampak Banjir Bima NTB, Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp 1 T

Jabbar Ramdhani - detikNews

Senin, 26 Des 2016 21:22 WIB

KERUGIAN AKIBAT BANJIR DI SUMBAWA RP22,8 MILIAR

© Kamis, 9 Februari 2012 19:17 WIB

Mataram, 9/2 (ANTARA) - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Sumbawa Wirawan, mengatakan, kerugian akibat banjir bandang yang terjadi pada 28 Januari 2012 di Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir dan Lopok sekitar Rp22,8 miliar.

Banjir Bandang Terjang Lombok, 2 Tewas dan 367 Rumah Rusak

Minggu, 19 November 2017 21:57 WIB



POTRET SDA DAN VISI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DI NTB

Potret SDA Kita (Rawan bencana dan daya lingkungan belum optimal):

- Tutupan hutan semakin berkurang akibat ilegal logging dan perambahan
- Bencana banjir dan rob berulang setiap tahun
- Krisis Sumberdaya Air
- Gagal tanam dan gagal panen
- Tata kelola sampah
- Kerusakan terumbu karang dan mangrove di wilayah pesisir
- Konsistensi implementasi Kebijakan pro lingkungan
- Pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan



Misi Pembangunan Lingkungan

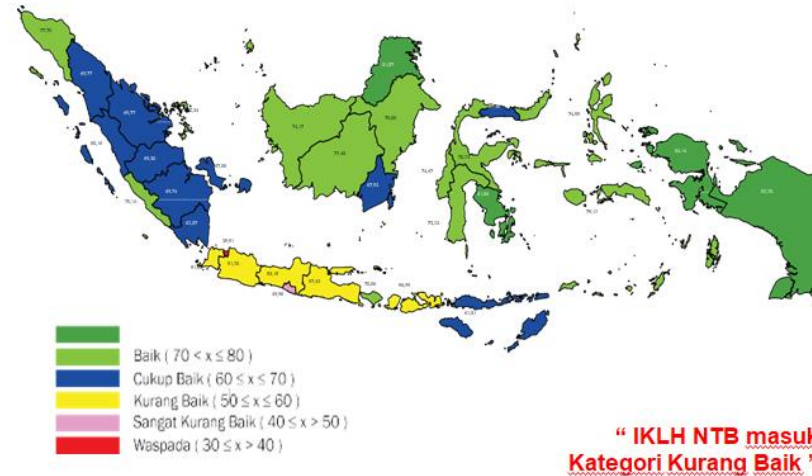
“NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.”

- Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

SEKTOR KEHUTANAN



Kondisi Lingkungan hidup dan kehutanan terkini di NTB



PENYEBAB



Penanganan
Sampah
Belum
Optimal

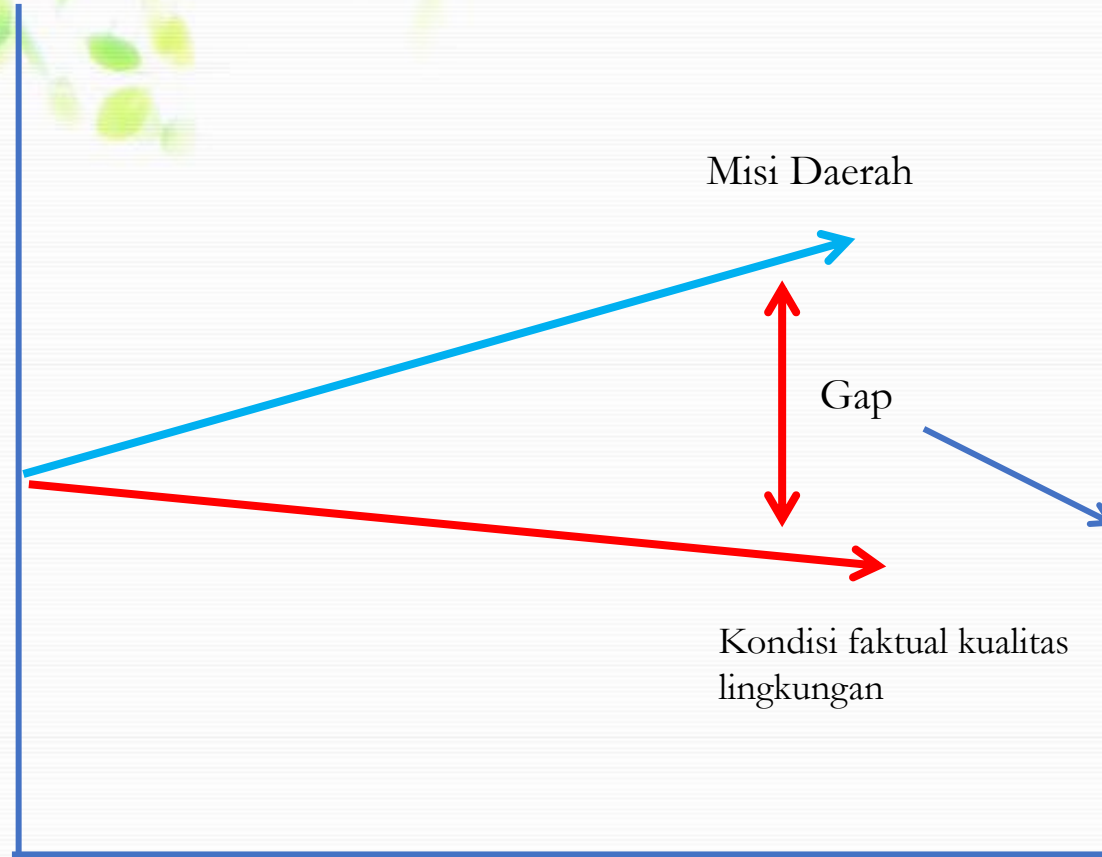
Pencemaran
Lingkungan

Degradasi
Hutan
dan Lahan

- Kawasan hutan NTB berbatasan langsung dengan 483 desa dari total 1.135 desa/kelurahan se-NTB. Sebagian besar dari desa desa tersebut tergolong miskin
- Okupasi lahan tinggi (+ 1500 bangunan didalam kawasan)
- Deforestasi tinggi 26 x lapangan bola perhari (2009-2013)
- Dana rehabilitasi yang dibutuhkan ±2,3 T (WWF 2014)
- NTB mengoleksi 11 dari 14 jenis bencana tingkat nasional

KONDISI LINGKUNGAN FAKTUAL VS IDEAL

Kualitas
Lingkungan



Misi Daerah

Gap

Kondisi faktual kualitas
lingkungan

Waktu

Dibutuhkan
sumber daya
memadai untuk
mengatasi gap
antara kondisi
faktual dengan
tujuan
pembangunan
lingkungan

Perlu Dukungan
memadai:

- Kebijakan
- Program
- Anggaran

SUMBER DAYA APA YANG SUDAH KITA PUNYA ?

OBYEK MONUMENTAL

1. Predikat sebagai Global Geopark (Rinjani)
2. Predikat sebagai Cagar Biosfeer (Rinjani dan SAMOTA)
3. Salah satu Destinasi Utama Wisata Indonesia dan Dunia
4. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Potensi Hasil Laut

PRODUK KEBIJAKAN DAERAH PRO LINGKUNGAN :

1. PERDA 14 2019 (Pengelolaan Hutan)
2. PERDA 5 2019 (Pengelolaan Sampah)
3. PERDA 5 2017 (Pengelolaan DAS)
4. PERDA 1 2019 (RPJMD 2019-2023)
5. PERDA 12 2017 (RZWP3K)
6. PERDA 9 2014 (penanggulangan Bencana)
7. PERGUB 54 2019 (Adaptasi Perubahan Iklim)
8. PERGUB 51 2012 (RAD-GRK)
9. PERGUB 36 2018 (RAD-SDGs)
10. PERGUB 44 2019 (Penjabaran IKU-RPJMD)

KEBUTUHAN

1. Ketersediaan Anggaran ?
2. Sistem Tata Kelola yang profesional dan bersih
3. Marketing Strategi Potensi Daerah
4. Efektivitas Aturan Kebijakan

APA YANG
PERLU
DILAKUKAN ?

PELUANG UNTUK DIGULIRKAN



PENUTUP

1

Kebijakan baru memberikan tantangan baru, sebagai proses transisi atau transformasi tata Kelola hutan

2

Perubahan kebijakan perlu direspons dengan mengedepankan inovasi baru dalam pengelolaan DAS

3

Pengalaman inisiatif local dapat ditarik sebagai sebuah pembelajaran untuk model pengelolaan DAS dengan pembenahan.